

MENINGKATKAN CITRA PERTANIAN MELALUI KEBUDAYAAN INDUSTRI

Oleh:

Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc. dan Rokhmin Dahuri, PhD.
(Staf pengajar Fakultas Peternakan dan Staf Pengajar Fakultas Perikanan;
Keduanya adalah anggota Tim Kerjasama Bappenas-IPB)

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki PJP II dan abad 21 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Dalam hal ini, tantangan yang paling fundamental adalah upaya Indonesia untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan secara berkesinambungan. Untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, produktivitas tenaga kerja dan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan.

Sektor pertanian (dalam arti luas) dalam PJP I merupakan salah satu sektor dominan dan telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan yang sangat berarti dari sektor pertanian, antara lain berupa penyediaan bahan kebutuhan dasar, pendapatan, kesempatan kerja, perolehan devisa, dan pembangunan daerah. Dengan potensi wilayah dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki negara Indonesia, sektor pertanian sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif, keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam kiprah pembangunan nasional pada PJP II dan abad 21.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia, dengan potensi sumberdaya dan daya dukung ekosistem yang sangat besar untuk dapat menghasilkan produk dan

jasa pertanian secara luas (seperti bahan pangan, serat, kayu, bahan obat-obatan dan agrowisata/ekowisata) yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia. Sementara itu, pertambahan jumlah penduduk dunia, kenaikan pendapatan dan perubahan preferensi konsumen telah menyebabkan permintaan terhadap produk dan jasa pertanian akan terus meningkat. Oleh karena itu sektor pertanian mempunyai peranan yang semakin strategis pada abad 21 baik secara ekonomis ataupun politis.

Tantangannya bagi sektor pertanian pada abad-21 adalah mensikapi perubahan pada sisi permintaan yang menuntut kualitas yang tinggi, kuantitas yang besar, ukuran relatif seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan penyampaian produk secara tepat waktu.

Dengan semakin meningkatnya permintaan produk dan jasa pertanian secara global, sementara penawaran (supply) diperkirakan relatif konstan, maka secara ekonomis produk dan jasa pertanian akan menjadi kompetitif. Dalam hubungan internasional, produk pertanian (khususnya pangan) acapkali keluar dari wujudnya sebagai tradable goods untuk konsumsi, menjadi diplomatic goods untuk tujuan politis. Foods weapon as a part of trade war sering digunakan oleh negara besar terhadap lawan politiknya seperti embargo AS terhadap Kuba, Iran, Irak dan Libya. Oleh karena itu bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia, mencukupi kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduknya berarti sekaligus dapat memperkuat posisinya

dalam percaturan politik internasional. Dengan perkataan lain, stabilitas politik suatu negara tidak akan mudah tergoyahkan bila kondisi pangan dan sandangnya mapan.

Pengalaman empiris di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Norwegia dan Belanda menunjukkan, bahwa betapapun majunya negara-negara tersebut dalam hal industrialisasi, tetapi tetap menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang diutamakan. Sebaliknya, negara bekas Uni Sovyet yang sebelumnya merupakan salah satu negara adi kuasa, dewasa ini peranannya menurun karena antara lain memomorduakan sektor pertaniannya, yang telah menyebabkan kekurangan pangan.

Tantangannya bagi sektor pertanian pada abad-21 adalah mensikapi perubahan pada sisi permintaan yang menuntut kualitas yang tinggi, kuantitas yang besar, ukuran relatif seragam, ramah lingkungan, kontinuitas produk dan penyampaian produk secara tepat waktu. Dari sisi penawaran yang berkaitan dengan produksi, terdapat beberapa faktor yang harus dicermati, terutama masalah penurunan luas lahan produktif, perubahan iklim secara eratic (tidak menentu) akibat fenomena El-Nino dan pemanasan global, adanya penerapan bioteknologi dalam proses produksi dan pasca panen, dan aspek pemasaran produk. Untuk menjawab sejumlah tantangan ini, maka diperlukan perubahan mendasar dalam pembangunan pertanian nasional secara konseptual maupun operasional.

Pada era globalisasi, daya saing tidak sepenuhnya bertumpu kepada

upah buruh rendah dan sumber daya alam berlimpah, tetapi lebih ditentukan oleh penguasaan informasi, teknologi dan keahlian manajerial. Misalnya Singapura saat ini sedang mengembangkan teknologi aerophonik untuk menanggulangi kekurangan lahan. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pembangunan pertanian termasuk di dalamnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerapan hasil-hasil penelitian (IPTEK) menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk segera dilaksanakan secara sistematis. Sehubungan dengan hal ini, maka melalui pidato ilmiah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita) yang disampaikan pada acara Dies Natalis IPB ke-33 diajukan suatu pemikiran baru dalam pembangunan pertanian. Gagasan baru tersebut berupa "Pembangunan Pertanian Berkebudayaan Industri (PPBI)" yang secara umum dapat diterjemahkan sebagai penanganan kegiatan pertanian berlandaskan budaya industri.

PPBI: VISI PERTANIAN INDONESIA ABAD 21

Sehubungan dengan potensi keunggulan komparatif yang dimiliki oleh sektor pertanian dan nilai strategisnya bagi pembangunan negara, sementara di lain pihak kontribusi ekonomi sektor pertanian dewasa ini semakin menurun, maka diperlukan suatu paradigma pembangunan pertanian baru dalam menghadapi abad 21. Paradigma pembangunan pertanian baru yang paling tepat untuk mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas adalah Pertanian Berkebudayaan Industri.

Pertanian berkebudayaan industri adalah suatu sistem terpadu industri biologis yang merupakan hasil karya, cipta dan rasa manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya biologi beserta

ekosistemnya; berorientasi pada efisiensi, produktivitas, kualitas serta nilai tambah secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; melalui penerapan IPTEK dan manajemen agribisnis secara terpadu dan dinamis; dikerjakan oleh pelaku pertanian profesional yang memiliki etos kerja industri dan karakteristik sosial budaya bangsa ber-Pancasila; ditujukan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berprinsip pada keadilan dan kesejahteraan.

Melalui pembangunan pertanian berkebudayaan industri, diharapkan sektor pertanian bersama sektor unggulan lainnya (seperti industri manufaktur dan jasa) dapat menjadi penggerak utama pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah kancah globalisasi dan perdagangan bebas abad 21.

Misi dan Tujuan

Visi pembangunan pertanian abad 21 merupakan kondisi ideal yang dicerminkan melalui definisi PPBI. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, dirumuskan misi pembangunan pertanian secara tepat. Ketepatan dalam perumusan misi pembangunan pertanian ini sangat penting, mengingat visi dan misi merupakan pijakan dasar dalam menetapkan perubahan yang hendak dicapai atau tujuan yang diharapkan.

Misi.

- Menciptakan produk dan jasa pertanian yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.
- Memelihara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan pertanian.
- Meningkatkan dan meratakan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya, dan pelaku pertanian khususnya.

- Meningkatkan kontribusi pertanian dalam ekonomi nasional

Tujuan.

- Meningkatkan taraf hidup petani, khususnya petani kecil, melalui peningkatan pendapatan dan nilai tambah dari kegiatan usaha pertaniannya.
- Meningkatkan kemampuan petani serta daya saing produk dan jasa pertanian nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas.
- Mencegah degradasi lingkungan akibat kegiatan pertanian dan kegiatan sektor lain, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekologis.
- Menjamin ketahanan pangan nasional secara proporsional, bermutu dan aman.
- Memanfaatkan SDA secara rasional guna menjamin kegiatan pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Ciri Sumberdaya Manusia Pertanian

Ciri sumberdaya manusia pertanian Indonesia sebagai pelaku PPBI dirumuskan sebagai berikut (diambil dari pidato Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita pada Dies Natalis IPB ke-33):

- Bersikap dan berpikir maju dengan memanfaatkan pengetahuan sebagai landasan utama pengambilan keputusan.
- Memiliki keahlian (profesionalisme) sebagai karakter yang menonjol.
- Berprilaku kooperatif yang bersifat dinamis dan fleksibel.
- Menghasilkan mutu dan keunggulan sebagai orientasi dan tujuan dalam bertindak.
- Melakukan efisiensi dan produktivitas sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumberdaya.
- Menggunakan kemajuan teknologi sebagai instrumen

utama dalam pemanfaatan sumberdaya.

- Memanfaatkan mekanisme pasar sebagai media utama dalam transaksi barang dan jasa.
- Memanfaatkan perekayasaan yang harmonis dengan alam, budaya dan lingkungan di sekitarnya.
- Berkemampuan mempertahankan dan menjaga potensi alam dan budaya yang luhur dari proses degradasi.

Gagasan pokok dalam mengembangkan strategi transformasi sikap dan perilaku dari agraris-tradisional menuju agraris-industrial, antara lain:

- Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang transformatif di kalangan masyarakat pertanian.
- Mengembangkan kemampuan individu dan kerja sama kelompok agar aktif dan dinamis seiring kemajuan IPTEK.
- Meningkatkan kematangan sosial dalam penerimaan dan penyaringan budaya industri.
- Reformasi kelembagaan dan pengembangan kelembagaan lokal.
- Pemberdayaan sikap keterbukaan petani dalam penerimaan inovasi.

Ciri Pengelolaan Sumberdaya Alam

Salah satu unsur pokok dalam kegiatan yang berkebudayaan industri adalah keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan produksi. Dalam pertanian, hal itu sangat ditentukan oleh ketersediaan SDA yang lestari. Oleh sebab itu aspek pengelolaan SDA yang lestari menjadi salah satu ciri penting dalam pertanian berkebudayaan industri.

Ciri Sistem dan Kelembagaan

Pada kegiatan PPBI pendekatan sistem adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Keterkaitan antara setiap

sub-sistem agribisnis mulai dari sistem yang ada pada on-farm di hulu sampai sistem yang ada pada off-farm di hilir merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan.

Pada sisi kelembagaan, pola hubungan antara lembaga agribisnis di hulu dengan di hilir bersifat komplementer dan saling menguntungkan termasuk di dalamnya peranan lembaga yang terkait sebagai pembina, pengawas, peneliti dan penentu kebijakan.

Ciri Sumberdaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu ciri pertanian yang berkebudayaan industri adalah adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan, pemakaian kemajuan teknologi sebagai instrumen utama pada pemanfaatan sumber daya dan perekayasaan untuk meningkatkan nilai tambah dan meminimalkan ketergantungan terhadap alam. Oleh karena itu pertanian di sini sangat terbuka dan responsif terhadap inovasi IPTEK tetapi selaras dengan lingkungan lokal. Di masa depan tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi tinggi dalam bidang bioteknologi dan telekomunikasi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan produktivitas maupun mutu serta nilai tambah produk pertanian.

Untuk menunjang PPBI, bioteknologi dan teknologi untuk pertanian organik merupakan tulang punggung IPTEK yang harus dikembangkan dan diperkuat. Kedua jenis teknologi tersebut memerlukan kekuatan intelegensi dan ketekunan SDM, ketersediaan perangkat keras (fasilitas laboratorium dan penunjangnya), kesinambungan riset, pendanaan, dan sistem koordinasi kelembagaan. Jadi perlu ada program terpadu antara perguruan tinggi pertanian, lembaga penelitian dan lembaga donor dalam melatih SDM untuk pengembangan IPTEK mulai dari tingkat bawah (teknisi) sampai tingkat atas (peneliti pasca doktoral).

Visualisasi Pembangunan Pertanian Berkebudayaan Industri

Beranjak dari visi, misi dan tujuan PPBI serta deskripsi hakekat dan karakteristik, berikut ini disajikan visualisasi (sosok atau model) tentang PPBI yang diandalkan di Indonesia.

Secara fungsi agribisnis, sistem PPBI meliputi tiga subsistem utama yang satu sama lain saling terkait erat, yaitu: (1) on-farm agribusiness, (2) off-farm agribusiness, dan (3) business environment. On-farm agribusiness terdiri dari kegiatan budidaya tanaman dan hewan, pemanenan (ekstraksi) tanaman dan hewan serta penanganan pasca panen, serta penjualan dan pemasaran produk primer (bahan mentah) pertanian.

Off-farm agribusiness secara garis besar terbagi dua, yakni kegiatan-kegiatan industri hulu pertanian dan kegiatan industri hilir pertanian. Industri dan kegiatan agribisnis hulu pertanian meliputi: (1) industri input produksi budidaya pertanian (pupuk, pestisida, dan benih) dan industri mesin serta peralatan budidaya pertanian; dan (2) penyampaian serta distribusi input budidaya pertanian dan mesin serta peralatan pertanian. Industri dan kegiatan agribisnis hilir pertanian mencakup: (1) procurement bahan mentah, (2) industri pengolahan bahan mentah/produk primer menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi, berupa produk sekunder atau produk tersier, (3) penjualan serta pemasaran bahan setengah jadi dan bahan jadi.

Lingkungan bisnis adalah berupa prasarana, sarana dan kebijakan yang mendukung bagi berfungsinya subsistem on-farm dan off-farm agribusiness, seperti: fasilitas kredit dan asuransi, penyuluhan dan penyediaan informasi, transportasi dan komunikasi, prasarana dasar pada tingkat lokal maupun nasional, penelitian dan pengembangan, dan kebijakan ekonomi makro dan tata ruang.

Dalam hal subsistem on-farm agribusiness, sebuah pertanian berkebudayaan industri pada intinya

mengupayakan agar produksi (budidaya atau ekstraksi) tanaman dan hewan dapat lebih efisien (murah), produktif, berkualitas, dan sesuai dengan waktu yang diinginkan masyarakat konsumen atau industri hilir pertanian. Kegiatan produksi pertanian yang selama ini masih secara tradisional sangat bergantung pada alam (iklim, hama dan penyakit), melalui penerapan IPTEK yang sesuai akan diubah menjadi kegiatan produksi yang lebih dapat ditargetkan, lebih efisien, produktif dan sesuai dengan waktu panen yang diinginkan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagai ilustrasi yang cukup representatif bagi visualisasi PPBI khususnya untuk komoditas tanaman pangan adalah keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengupayakan swasembada beras. Keberhasilan swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984 tersebut, rintisanannya sudah dimulai sekitar 20 tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 1963, yang terkenal dengan sebutan program BIMAS yang dipelopori oleh Fakultas Pertanian - IPB Bogor. Inti program ini adalah penerapan paket teknologi dalam budidaya tanaman padi, yang populer dengan sebutan Panca Usaha Tani.

Akan halnya subsistem off-farm agribusiness, PPBI menekankan pentingnya industri pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui industri pengolahan pasca panen ini, nilai tambah produk pertanian menjadi berlipat ganda. Namun demikian, perlu ada jaminan bahwa nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian ini hendaknya mengalir ke petani yang bekerja di subsistem on-farm (kegiatan budidaya dan pemanenan).

Sesungguhnya sub-sistem agribisnis hilir di luar areal produksi (off-farm) atau yang lebih populer dengan sebutan agroindustri dapat dijadikan motor penggerak PPBI. Di antara

manfaat pengembangan agroindustri yang cukup penting adalah :

- Meningkatkan nilai tambah produk pertanian
- Mempertluas daerah pemasaran
- Meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitar
- Memungkinkan diversifikasi produk.
- Meningkatkan devisa, baik dari kegiatan ekspor ataupun substitusi impor

Agar subsistem on-farm dan off-farm agribusiness memiliki kinerja yang efisien, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi Pertanian Berkebudayaan Industri, maka lingkungan bisnis perlu dirancang dan diimplementasikan agar bersifat kondusif bagi bekerjanya kedua subsistem utama secara optimal.

PENYEBARLUASAN KONSEP PPBI

Konsep PPBI tidak bisa dilepaskan dari kegiatan budaya akademik masyarakat secara totalitas. Artinya PPBI adalah bagian integral dari kegiatan di masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based society). Untuk itu kegiatan sosialisasi/penyebarluasan konsep PPBI dipergunakan konsep:

- Pendidikan berjenjang dan berkesinambungan sejak mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi (sekolah dasar - perguruan tinggi).
- Teknologi bertatar mulai dari teknologi sederhana sampai teknologi tingkat tinggi.
- Integratif dan komprehensif dengan memanfaatkan semua unsur kelembagaan baik lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga bisnis (swasta/BUMN), kelompok tani, lembaga media cetak/ elektronik, dan lembaga pendidikan (SD, SLTP, SLTA, dan universitas).

Berdasarkan konsep di atas, maka kegiatan penyebarluasan informasi PPBI dilakukan dengan cara:

- Penyusunan kurikulum pertanian yang berkebudayaan industri untuk tingkat dasar dan menengah, jenis teknologi disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah setempat dengan tetap mencirikan kesatuan integral kegiatan pertanian sebagai unsur yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Pembuatan buku teks bahan kuliah pengantar ilmu pertanian untuk mahasiswa pertanian di seluruh Indonesia dengan materi diambil dari konsep PPBI.
- Pembuatan bahan-bahan informasi PPBI melalui teknologi cetak, audio/ video, serta teknologi informasi baru lainnya.
- Penayangan acara-acara PPBI di televisi nasional melalui kerjasama dengan TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) dengan menampilkan pentingnya pertanian yang dikelola secara integratif dan merupakan paduan antara sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya teknologi (SDT), sumberdaya kelembagaan (SDK).
- Kursus-kursus singkat (Diklat) untuk pengenalan dan penerapan prototipe-prototipe PPBI yang telah ditemukan oleh para peneliti di lembaga pendidikan dan penelitian.

OPERASIONALISASI PPBI

PPBI menuntut kejelasan tipologi dan sektor/sub-sektor komoditi pertanian unggulan dalam suatu wilayah pengembangan. Informasi ini pada intinya merupakan prasyarat dan prakondisi yang tingkat kesesuaiannya akan mengantarkan pada keberhasilan PPBI di wilayah tersebut yang dapat direpresentasikan dalam besaran-besaran yang terukur. Oleh karena itu, di sini diperlukan suatu mekanisme pengukuran pada setiap komponen,

yaitu pada sistem, sub-sistem, kriteria dan sub-kriteria yang terdapat dalam PPBI. Hal ini mengantarkan pada perlunya penentuan tolok ukur-tolok ukur dan derajat kepentingan untuk setiap komponen dalam PPBI (Gambar 1).

Tolok ukur dapat diberikan tidak saja dalam format kuantitatif, misalnya untuk mengukur kebutuhan air atau investasi tetapi juga dalam klasifikasi subjektif bila itu menyangkut aspek legal atau sosial. Tolok ukur ini bukan saja akan memberikan andil dalam PPBI secara keseluruhan tetapi juga dapat menjadi indikator kekuatan setiap komponen dalam menunjang PPBI.

Jika dilihat dari tipologi dan subsektor pertanian, tolok ukur untuk setiap komponen yang ada dapat berlainan sesuai dengan spesifikasi wilayah pengembangannya. Sebagai contoh, kekuatan komponen PPBI yang dijadikan acuan utama untuk hortikultura di lahan kering mungkin berbeda dengan yang di lahan basah. Dilain pihak, kekuatan antar komponen dalam PPBI untuk sektor tertentu dapat berubah-ubah tergantung umpamanya pada wilayah administratif dimana PPBI itu diterapkan.

Oleh karena itu dalam penentuan unit/satuan untuk setiap

komponen PPBI perlu pula mempertimbangkan kekuatan-kekuatan atau dominasi di antara setiap komponen tersebut. Hal yang terakhir ini mengantarkan pada perlunya sistem pembobotan yang realistis agar hasil pertimbangan tidak hanya dari satu sudut pandang tetapi dari berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi dominasi antar kepentingan. Sebagai contoh, dalam satu kasus pada PPBI untuk lahan basah mungkin kepentingan lingkungan perlu diprioritaskan untuk menjaga kesinambungan produksi dan oleh karena itu diberi pembobotan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Hal seperti ini mungkin pula tidak berlaku jika diterapkan untuk lahan kering dimana ketersediaan air harus mendapat prioritas tinggi.

Dengan demikian di sini diperlukan adanya mekanisme penentuan terhadap dua hal, yakni pemberian nilai dan bobot untuk setiap komponen dalam PPBI agar dapat dimunculkan suatu indeks PPBI yang menyatakan sejauh mana operasionalisasinya di suatu wilayah. Dilain pihak, perlu juga ditentukan nilai-nilai normatif yang akan dijadikan acuan untuk memberikan justifikasi terhadap indeks PPBI yang dihasilkan.

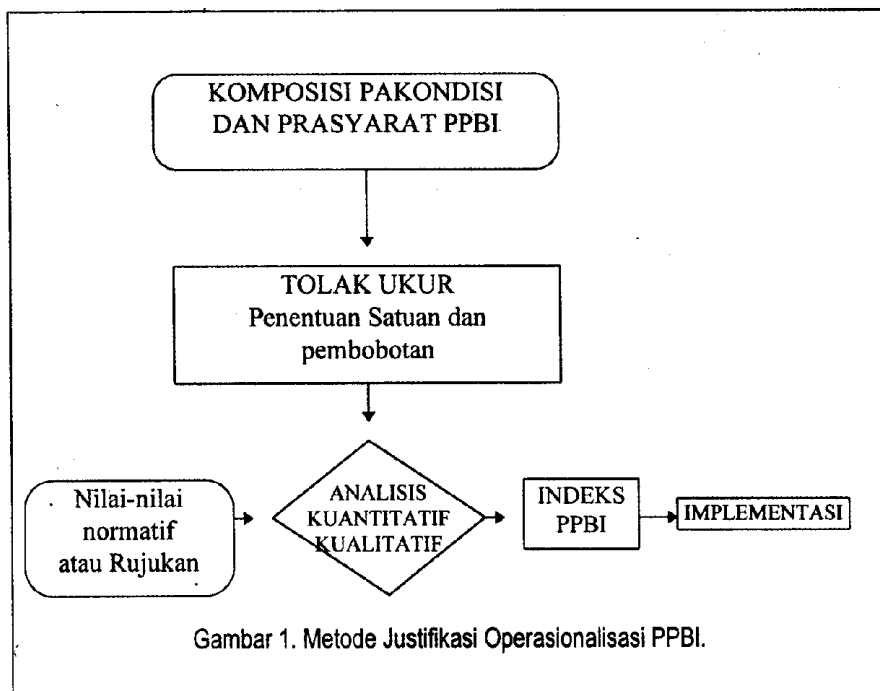
Indeks PPBI selanjutnya dapat dipakai sebagai gambaran kesesuaian

operasional PPBI untuk suatu komoditi tertentu dalam suatu wilayah pengembangan. Semakin tinggi indeks yang dicapai semakin berhasil pelaksanaan PPBI tersebut. Indeks ini akhirnya akan merupakan indikator dalam rangka penyempurnaan dan penentuan kaji tindak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi PPBI sub-sektor tertentu pada satu wilayah pengembangan.

PENUTUP

Dari konsep PPBI yang dituangkan di atas jelas-jelas diperlukan adanya keterpaduan dengan sektor-sektor lainnya yang bersifat saling menunjang dan komplementari. Hal ini akan berjalan dengan baik melalui kesungguhan politik pemerintah dalam mendongkrak citra pertanian ini yang dituangkan dalam bentuk pelaksanaan perundangan secara konsisten dan penuh kedisiplinan. Bersamaan dengan itu, semua prototipe hasil penelitian baik dari bidang IPTEK ataupun kelembagaan mulai dibangkitkan untuk kemudian disebarluaskan dalam bentuk paket-paket teknologi dan brosur-brosur untuk informasi pasar, perundangan, dan hal-hal lainnya yang perlu diketahui oleh para petani.

Pepatah "tiada gading yang tak retak" sangat tepat untuk konsep PPBI ini. Untuk itu kegiatan yang berupa pemantauan, revisi dan evaluasi akan berperan secara dominan. Selain itu, penulis sangat menunggu masukan ide-ide para pembaca supaya konsep PPBI ini dapat diimplementasikan untuk tercapainya kesejahteraan lahir dan bathin bangsa Indonesia.



Gambar 1. Metode Justifikasi Operasionalisasi PPBI.

KEPUSTAKAAN

Tim IPB/Bappenas, 1997. Ringkasan Eksekutif: Pembangunan Pertanian Berkebudayaan Industri.

Tim IPB/Bapennas, 1997. Kerangka Acuan Operasionalisasi Pembangunan Pertanian Berkebudayaan Industri